



***ECOLOGICAL NORM CITIZENSHIP: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS
TENTANG NORMA KEWARGANEGARAAN EKOLOGIS TAHUN 2019–2025***

I Nengah Agus Tripayana ^{1)*}, Fitriah Artina²⁾

¹²Universitas Mataram

E-mail: tripayanaagus@unram.ac.id

ABSTRAK

Ecological norm citizenship atau norma kewarganegaraan ekologis merupakan konsep yang mengintegrasikan hak, kewajiban, dan kebajikan warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan melakukan tinjauan literatur sistematis (*Systematic Literature Review*/SLR) terhadap artikel-artikel ilmiah yang mengkaji konsep, implementasi, dan norma kewarganegaraan ekologis yang dipublikasikan pada periode 2019–2025. Menggunakan protokol PRISMA, sebanyak 287 artikel diidentifikasi dari basis data Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan ERIC, dan setelah proses penyaringan, 20 artikel memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis secara mendalam. Hasil analisis menunjukkan lima tema utama: (1) konsep dan karakteristik *ecological norm citizenship*; (2) norma ekologis dan perilaku pro-lingkungan; (3) pendidikan kewarganegaraan ekologis; (4) kewarganegaraan digital dan keterlibatan pemuda dalam isu ekologi; dan (5) kebajikan ekologis dan keadilan lingkungan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa norma kewarganegaraan ekologis bersifat multidimensi, mencakup tanggung jawab moral terhadap lingkungan, keterlibatan sipil aktif, dan kompetensi ekologis yang dibangun melalui pendidikan. Penelitian ini memberikan kontribusi sintesis konseptual yang komprehensif bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan ekologis di Indonesia.

Kata Kunci: *Ecological norm citizenship*; norma ekologis; perilaku pro-lingkungan; pendidikan kewarganegaraan; tinjauan literatur sistematis

ABSTRACT

Ecological norm citizenship integrates citizens' rights, obligations, and virtues in preserving the environment. This study aims to conduct a Systematic Literature Review (SLR) of scholarly articles examining the concept, implementation, and norms of ecological citizenship published between 2019 and 2025. Using the PRISMA protocol, 287 articles were identified from Scopus, Web of Science, Google Scholar, and ERIC databases, and after screening, 20 articles met the inclusion criteria for in-depth analysis. The analysis revealed five major themes: (1) the concept and characteristics of ecological norm citizenship; (2) ecological norms and pro-environmental behaviour; (3) ecological citizenship education; (4) digital citizenship and youth engagement in ecological issues; and (5) ecological virtues and environmental justice. These findings imply that ecological norm citizenship is multidimensional, encompassing moral responsibility toward the environment, active civic engagement, and ecological competencies built through education. This study provides a comprehensive conceptual synthesis for the development of ecological citizenship education in Indonesia.

Keywords: *Ecological norm citizenship; ecological norms; pro-environmental behaviour; civic education; systematic literature review*



PENDAHULUAN

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan hidup merupakan tantangan global yang menuntut respons tidak hanya dari pemerintah dan institusi, tetapi juga dari warga negara secara individual maupun kolektif. Dalam konteks ini, konsep kewarganegaraan tidak lagi dapat dibatasi pada dimensi politik dan sosial semata, melainkan harus diperluas untuk mencakup tanggung jawab ekologis. Ecological norm citizenship, atau norma kewarganegaraan ekologis, hadir sebagai kerangka konseptual yang menempatkan kewajiban moral terhadap alam sebagai bagian integral dari identitas dan praktik kewarganegaraan.

Dobson (2007) telah meletakkan fondasi teoritik penting dengan membedakan antara kewarganegaraan lingkungan (*environmental citizenship*) yang bersifat kontraktual dan berbasis hak, dengan kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*) yang bersifat non-kontraktual dan berbasis kewajiban moral yang dipicu oleh jejak ekologis (*ecological footprint*) seseorang. Gagasan ini kemudian berkembang melalui berbagai penelitian yang mengeksplorasi bagaimana norma-norma ekologis terbentuk, disebarluaskan, dan diimplementasikan dalam perilaku warga negara.

Dalam satu dekade terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam kajian mengenai *ecological norm citizenship*, baik dari perspektif filosofis, sosiologis, maupun pedagogis. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran global terhadap krisis iklim, agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta pergeseran paradigma pendidikan kewarganegaraan yang semakin memasukkan dimensi keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Namun demikian, sintesis sistematis yang komprehensif mengenai tema ini, khususnya yang mencakup perkembangan terbaru periode 2019–2025, masih sangat terbatas.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan biodiversitas yang luar biasa menghadapi tantangan ekologis yang serius, mulai dari deforestasi, pencemaran lingkungan, hingga perubahan iklim yang berdampak pada komunitas-komunitas rentan. Pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran dan kompetensi ekologis menjadi semakin mendesak. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mata pelajaran wajib di Indonesia memiliki potensi strategis untuk menjadi wahana pengembangan norma kewarganegaraan ekologis, namun implementasinya masih perlu dikuatkan melalui landasan konseptual yang lebih kokoh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis konsep *ecological norm citizenship* menurut literatur terkini; (2) memetakan tema-tema utama yang muncul dalam penelitian tentang norma kewarganegaraan ekologis periode 2019–2025; (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan norma kewarganegaraan ekologis; dan (4) merumuskan implikasi bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan ekologis, khususnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengikuti panduan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). SLR dipilih karena memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis yang terstruktur dan dapat direplikasi terhadap seluruh penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan (Aprilianata & Ramadhan, 2025; Ardoin et al., 2023).



Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi yang diterapkan meliputi: (1) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terindeks bereputasi; (2) rentang waktu publikasi 2019–2025; (3) berfokus pada ecological citizenship, norma kewarganegaraan ekologis, perilaku pro-lingkungan dalam konteks kewarganegaraan, atau pendidikan kewarganegaraan ekologis; (4) menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia; dan (5) tersedia dalam teks lengkap. Adapun kriteria eksklusi mencakup: literatur abu-abu (grey literature), buku teks, laporan lembaga non-akademik, skripsi/tesis/disertasi yang tidak dipublikasikan, dan artikel yang tidak memiliki hubungan langsung dengan ecological norm citizenship.

Strategi Pencarian

Pencarian literatur dilakukan pada empat basis data elektronik, yaitu Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan ERIC. Kata kunci yang digunakan adalah kombinasi dari: “ecological citizenship”, “environmental citizenship norms”, “pro-environmental behaviour”, “civic ecology”, “ecological norm”, “kewarganegaraan ekologis”, “ecocitizenship”, “environmental civic engagement”, dan “ecological civic virtue”. Kombinasi kata kunci menggunakan operator Boolean AND dan OR untuk memaksimalkan cakupan pencarian.

Proses Seleksi Artikel

Proses seleksi artikel dilakukan melalui empat tahap sesuai protokol PRISMA. Tahap pertama adalah identifikasi, di mana seluruh artikel yang ditemukan dari keempat basis data dicatat. Tahap kedua adalah skrining judul dan abstrak untuk mengeliminasi artikel yang jelas tidak relevan. Tahap ketiga adalah penilaian kelayakan berdasarkan teks lengkap dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi secara lebih ketat. Tahap keempat adalah penetapan artikel final yang dianalisis. Ringkasan proses seleksi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Proses Seleksi Artikel Berdasarkan Protokol PRISMA

Tahapan	Keterangan	Jumlah Artikel
Identifikasi (pencarian basis data)	Scopus, Web of Science, Google Scholar, ERIC	287
Setelah duplikasi dihapus	–	249
Skrining judul & abstrak	Relevansi topik, tahun 2019–2025	84
Kelayakan teks lengkap	Kriteria inklusi/eksklusi diterapkan	29
Artikel yang dimasukkan	Artikel final untuk dianalisis	20

(Sumber: Hasil pengolahan penulis, 2025)

Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik (thematic synthesis) sebagaimana direkomendasikan oleh Thomas dan Harden (2008). Setiap artikel yang lolos seleksi dikodekan berdasarkan: penulis dan tahun, negara/konteks penelitian, metode penelitian, fokus kajian, dan temuan utama. Selanjutnya, kode-kode tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang kemudian dikembangkan menjadi tema-tema deskriptif dan analitis. Proses ini memungkinkan identifikasi pola dan kesenjangan dalam literatur secara sistematis.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan proses seleksi, 20 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis dalam tinjauan sistematis ini. Gambaran umum artikel yang dianalisis disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Artikel yang Dianalisis

No	Penulis (Tahun)	Jurnal/Sumber	Fokus Kajian	Metode
1	Gao (2025)	Critical Review of International Social and Political Philosophy	Kebajikan kewarganegaraan ekologis: kritik internal terhadap pendekatan virtue-ethics	Konseptual
2	Gooding & Phillips (2025)	Sustainability (MDPI)	Menyelaraskan masa depan digital dengan kewarganegaraan ekologis untuk keberlanjutan	Konseptual
3	Bourban (2023)	Future Humanities (Wiley)	Kewarganegaraan ekologis kosmopolitan: perspektif global	Konseptual
4	Lu (2024)	Environmental Politics	Praktik kewarganegaraan hijau di perkotaan Tiongkok: aktif, penuh kewajiban, pragmatis	Kualitatif
5	Poškus (2024)	Humanities and Social Sciences Communications	Pengujian model sederhana kewarganegaraan lingkungan pada remaja	Kuantitatif
6	Hernández G de Velazco (2023)	Global Society (Tandfonline)	Kewarganegaraan global menuju perlindungan lingkungan partisipatif	Konseptual
7	Aprilianata & Ramadhan (2025)	Journal of Civics and Moral Studies (UNESA)	Implementasi kewarganegaraan ekologis untuk meningkatkan kesadaran lingkungan: SLR	SLR
8	Ardoin et al. (2023)	Environmental Education Research	Tinjauan campuran sistematis tentang hasil keterlibatan sipil dalam pendidikan lingkungan	Mixed-SLR
9	Sarid & Goldman (2021)	Sustainability (MDPI)	Kerangka berbasis nilai menghubungkan kewarganegaraan lingkungan dengan agen perubahan keberlanjutan	Konseptual
10	Ariza et al. (2021)	Sustainability (MDPI)	Promosi kewarganegaraan lingkungan dalam pendidikan melalui Kuesioner Kesadaran Keberlanjutan	Kuasi-eksperimen
11	Syahri & Salahudin (2024)	Journal of Infrastructure, Policy and Development	Memahami kewarganegaraan ekologis melalui literatur global: analisis bibliometrik	Bibliometrik
12	Misra (2023)	Culture, Agriculture, Food and Environment	Praktik kewarganegaraan ekologis melalui pertanian komunitas: peluang, tantangan, dan keadilan	Kualitatif
13	Christodoulou & Grace (2024)	Science & Education (Springer)	Anak sebagai warga alam liar: artikulasi kewarganegaraan lingkungan dalam konteks kehilangan biodiversitas	Studi kasus
14	Park & Kim (2020)	Asia-Pacific Science Education	Dampak kegiatan proyek pada pengembangan kewarganegaraan ekologis di klub perubahan iklim SMA	Kualitatif



No	Penulis (Tahun)	Jurnal/Sumber	Fokus Kajian	Metode
15	Kabatiah et al. (2024)	SCITEPRESS (Prosiding)	Keterlibatan warga muda dalam kewarganegaraan ekologis untuk SDGs: SLR	SLR
16	Nurdiansyah & Komalasari (2023)	Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan & Pembangunan (UNJ)	Membentuk kewarganegaraan ekologis melalui pendidikan lingkungan berbasis kegiatan masyarakat	Deskriptif kualitatif
17	Sari et al. (2020)	Jurnal Ketahanan Nasional (UGM)	Penguatan kewarganegaraan ekologis untuk mewujudkan ketahanan lingkungan di Kampung Hijau Yogyakarta	Studi kasus
18	Gusmadi & Samsuri (2019)	Jurnal Ilmiah PPKn (UM)	Gerakan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya pembentukan karakter peduli lingkungan	Deskriptif
19	Usmi & Murdiono (2021)	Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan (UNY)	Kewarganegaraan ekologis dalam buku teks PPKn jenjang sekolah menengah	Analisis konten
20	Biskupovic et al. (2022)	Frontiers in Sustainable Food Systems	Demokrasi pangan dan keberlanjutan: kebun komunitas mempromosikan kewarganegaraan ekologis	Kualitatif komparatif

(Sumber: Hasil pengolahan penulis, 2025)

Dari analisis terhadap 20 artikel tersebut, ditemukan lima tema utama yang merepresentasikan perkembangan pemikiran tentang ecological norm citizenship dalam periode 2019–2025. Berikut adalah pembahasan masing-masing tema.

1. Konsep dan Karakteristik Ecological Norm Citizenship

Tema pertama yang muncul secara konsisten dalam literatur adalah perkembangan dan redefinisi konsep *ecological norm citizenship*. Gao (2025) dalam kajian filosofisnya yang mendalam melakukan kritik internal terhadap literatur kewarganegaraan ekologis, berargumen bahwa penolakan para teoritis terhadap pendekatan *virtue ethics* tidak dapat dipertahankan karena kekacauan konseptual mengenai makna kebajikan itu sendiri. Gao mengusulkan bahwa kita perlu mengadopsi pendekatan *virtue ethics* sekaligus memperkuat dimensi ekologis dari akun-akun yang ada agar mencakup komponen etis yang membahas hubungan antara manusia dan dunia non-manusia (*more-than-human world*).

Bourban (2023) memperluas kerangka ini dengan mengembangkan konsep kewarganegaraan ekologis kosmopolitan (*ecological cosmopolitan citizenship*), yang menempatkan tanggung jawab ekologis dalam konteks global yang melampaui batas-batas negara. Perspektif kosmopolitan ini menekankan bahwa norma-norma kewarganegaraan ekologis harus mencakup kewajiban terhadap sesama manusia di seluruh dunia yang terdampak oleh perubahan iklim, sekaligus kewajiban terhadap ekosistem itu sendiri. Hernández G de Velazco (2023) melengkapi perspektif ini dengan mengembangkan teori Kewarganegaraan Global Lingkungan (*Environmental Global Citizenship*) yang menawarkan perspektif tata kelola lingkungan partisipatif dengan menekankan keragaman budaya sebagai kekuatan, bukan hambatan.

Syahri dan Salahudin (2024) melalui analisis bibliometrik terhadap literatur global tentang kewarganegaraan ekologis menemukan bahwa penelitian di bidang ini berkembang pesat terutama setelah tahun 2015 (seiring Agenda 2030 SDGs) dan semakin interdisipliner, menggabungkan perspektif dari ilmu politik, sosiologi, filsafat lingkungan, dan pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa *ecological norm citizenship* telah berkembang dari konsep yang semula bersifat normatif-filosofis menjadi konstruk yang lebih empiris dan praktikal.

2. Norma Ekologis dan Perilaku Pro-Lingkungan

Tema kedua berfokus pada hubungan antara norma ekologis dan perilaku pro-lingkungan warga. Pořkus (2024) menguji model sederhana kewarganegaraan lingkungan (*simple model of environmental citizenship*) pada sampel remaja, dan menemukan kesenjangan antara pengetahuan yang dirasakan (*perceived knowledge*) tentang isu lingkungan dan pengetahuan faktual. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi ekologis yang dirasakan (“merasa tahu”) tidak selalu berkorelasi dengan pengetahuan aktual, dan bahwa pengetahuan faktual serta kompetensi yang dirasakan secara bersama-sama memprediksi keterlibatan sipil dalam aktivitas kewarganegaraan lingkungan. Ini mengimplikasikan bahwa pembentukan norma ekologis memerlukan kombinasi pengetahuan substantif dan pengembangan efikasi diri ekologis.

Lu (2024) dalam studi kualitatif yang mendalam terhadap komunitas “zero waste” perkotaan di Tiongkok menemukan bahwa warga hijau (*green citizens*) mengartikulasikan identitas kewarganegaraan ekologis mereka melalui tiga dimensi yang saling berjaln: aktif (*active*), penuh kewajiban (*dutiful*), dan pragmatis (*pragmatic*). Warga yang termotivasi oleh rasa kewajiban mendalam terhadap alam dan generasi mendatang cenderung menetapkan tujuan yang realistis dan berkomitmen untuk mempraktikkan konsumsi berkelanjutan sekaligus membangun keluarga dan komunitas yang ramah lingkungan. Lu juga menemukan bahwa kewarganegaraan hijau di Tiongkok secara bersamaan bersifat gendered dan classed, membuka implikasi penting tentang bagaimana norma ekologis berinteraksi dengan struktur sosial yang lebih luas.

Sarid dan Goldman (2021) mengembangkan kerangka berbasis nilai yang menghubungkan kewarganegaraan lingkungan dengan agen perubahan keberlanjutan (*change agents for sustainability*). Menggunakan teori nilai Schwartz sebagai landasan, mereka menunjukkan bahwa nilai-nilai biosfer dan altruistik secara signifikan memprediksi kecenderungan seseorang untuk bertindak sebagai warga negara lingkungan yang aktif. Kerangka ini memiliki implikasi langsung bagi pengembangan pendidikan yang bertujuan membentuk norma kewarganegaraan ekologis, karena menunjukkan bahwa transformasi nilai merupakan komponen esensial di samping peningkatan pengetahuan.

3. Pendidikan Kewarganegaraan Ekologis

Tema ketiga yang muncul kuat dalam literatur adalah peran pendidikan dalam membentuk dan mengembangkan norma kewarganegaraan ekologis. Ardoin et al. (2023) dalam tinjauan campuran sistematis (*systematic mixed studies review*) terhadap penelitian tentang keterlibatan sipil dalam pendidikan lingkungan menemukan bahwa program pendidikan lingkungan yang berkualitas secara konsisten menghasilkan peningkatan dalam pengetahuan ekologis, sikap pro-lingkungan, efikasi sipil, dan kecenderungan untuk berpartisipasi dalam tindakan kolektif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pendekatan pedagogis yang digunakan, dengan program-program berbasis pengalaman dan keterlibatan komunitas menunjukkan hasil terbaik.



Ariza et al. (2021) dalam penelitian kuasi-eksperimental yang dilakukan di tiga negara (Spanyol, Belgia, dan Swedia) menguji potensi Kuesioner Kesadaran Keberlanjutan (*Sustainability Consciousness Questionnaire/SCQ*) untuk mengukur dampak intervensi pendidikan kewarganegaraan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konteks, durasi, dan kelompok sasaran berbeda, intervensi yang berbagi fitur pedagogis yang sama (belajar berbasis masalah, refleksi kritis, aksi nyata) secara konsisten meningkatkan kesadaran keberlanjutan peserta. Temuan ini menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan ekologis yang efektif harus melampaui transmisi pengetahuan untuk mencakup pengembangan nilai-nilai dan mendorong aksi konkret.

Park dan Kim (2020) mendokumentasikan pengalaman klub perubahan iklim di sekolah menengah atas Korea, menemukan bahwa kegiatan proyek berbasis aksi nyata seperti kampanye lingkungan, pemantauan kualitas udara, dan advokasi kebijakan sekolah secara signifikan meningkatkan kompetensi kewarganegaraan ekologis siswa. Studi ini menunjukkan bahwa konteks informal di luar kurikulum formal pun dapat menjadi ruang yang efektif untuk pembentukan norma ekologis. Dalam konteks Indonesia, Nurdiansyah dan Komalasari (2023) menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan berbasis kegiatan masyarakat, seperti pengelolaan sampah komunal, pembibitan pohon, dan pertanian komunitas, merupakan wahana yang kuat untuk membentuk kewarganegaraan ekologis, terutama ketika diintegrasikan dengan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional.

4. Kewarganegaraan Digital dan Keterlibatan Pemuda dalam Isu Ekologi

Tema keempat mencerminkan perkembangan kontemporer yang penting: persimpangan antara kewarganegaraan digital, keterlibatan pemuda, dan norma ekologis. Gooding dan Phillips (2025) dalam kajian konseptual mereka tentang “masa depan digital yang selaras dengan kewarganegaraan ekologis” berargumen bahwa inovasi digital dan keberlanjutan harus dikontekstualisasikan ulang sebagai proyek yang *co-aligned*. Kewarganegaraan ekologis, menurut mereka, menawarkan lensa yang khas untuk membentuk evolusi Masyarakat Digital Berkelanjutan (*Sustainable Digital Society*), di mana individu, komunitas, dan institusi bertanggung jawab atas konsekuensi lingkungan dari praktik digital mereka. Ini membuka dimensi baru norma ekologis: kewajiban untuk memperhitungkan *carbon footprint* dari kehidupan digital.

Kabatiah et al. (2024) dalam tinjauan literatur sistematis mereka tentang keterlibatan warga muda dalam kewarganegaraan ekologis untuk SDGs menemukan bahwa generasi muda memiliki kapasitas dan motivasi yang signifikan untuk menjadi warga negara ekologis yang aktif, namun memerlukan platform dan struktur kesempatan yang tepat. Model keterlibatan komunitas terintegrasi yang dirumuskan dari tinjauan ini menekankan pentingnya menghubungkan pengetahuan ekologis dengan keterampilan advokasi digital dan keterlibatan komunitas lokal.

Christodoulou dan Grace (2024) dalam studi kolaboratif mereka dengan lima sekolah dasar di Inggris mendokumentasikan bagaimana program “Wild Citizens” yang berbasis pembelajaran inkuiri sosioscientific membantu anak-anak mengartikulasikan identitas mereka sebagai warga lingkungan dalam konteks kehilangan biodiversitas. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan langsung dengan ekosistem lokal dan isu-isu biodiversitas yang nyata dapat memperkuat internalisasi norma ekologis pada usia dini, jauh sebelum anak-anak secara formal mempelajari konsep kewarganegaraan.



5. Kebajikan Ekologis dan Keadilan Lingkungan

Tema kelima berfokus pada dimensi kebajikan ekologis (*ecological virtues*) dan keadilan lingkungan sebagai fondasi norma kewarganegaraan ekologis. Mathews (2024) mengeksplorasi hubungan antara etika kebajikan dan diri ekologis (*ecological self*), berargumen bahwa transisi dari kebajikan lingkungan menuju kebajikan ekologis memerlukan pergeseran ontologis mendalam tentang bagaimana kita memahami hubungan antara diri manusia dan alam. Kebajikan ekologis, berbeda dari kebajikan lingkungan yang bersifat instrumental, menuntut pengakuan bahwa manusia adalah bagian dari, bukan terpisah dari, sistem ekologis yang lebih luas.

Misra (2023) menyelidiki praktik kewarganegaraan ekologis melalui pertanian yang didukung komunitas (*community supported agriculture/CSA*) di Amerika Serikat, menemukan bahwa meskipun CSA menawarkan peluang nyata untuk mempraktikkan norma-norma ekologis seperti konsumsi bertanggung jawab dan hubungan langsung dengan produsen pangan lokal, ia juga menghadapi tantangan berupa eksklusi sosial dan ketidaksetaraan akses. Temuan ini menegaskan bahwa norma kewarganegaraan ekologis tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan-pertanyaan keadilan sosial.

Biskupovic et al. (2022) dalam studi komparatif antara Prancis dan Chili menunjukkan bagaimana kebun komunitas (*community gardens*) berfungsi sebagai ruang untuk mempraktikkan kewarganegaraan ekologis sekaligus mempromosikan demokrasi pangan. Kebun komunitas memungkinkan warga untuk bereksperimen dengan praktik-praktik berkelanjutan, membangun hubungan sosial lintas kelas, dan secara kolektif mengartikulasikan visi alternatif tentang hubungan manusia dengan pangan dan alam. Dalam konteks Indonesia, Sari et al. (2020) mendokumentasikan bagaimana Kampung Hijau di Yogyakarta mengimplementasikan berbagai program yang memperkuat kewarganegaraan ekologis warganya, mulai dari pengelolaan sungai, tanam pohon, hingga pengelolaan sampah mandiri dan penggunaan energi alternatif. Temuan ini menunjukkan bahwa konteks lokal dan kearifan komunitas merupakan fondasi yang kuat bagi pengembangan norma kewarganegaraan ekologis di Indonesia.

Gusmadi dan Samsuri (2019) serta Usmi dan Murdiono (2021) mengeksplorasi gerakan dan representasi kewarganegaraan ekologis dalam konteks pendidikan Indonesia. Gusmadi dan Samsuri menemukan bahwa gerakan kewarganegaraan ekologis di Bangka Belitung telah berhasil membentuk karakter peduli lingkungan melalui kombinasi pendekatan edukatif dan aksi lingkungan langsung. Sementara itu, Usmi dan Murdiono menganalisis representasi konsep kewarganegaraan ekologis dalam buku teks PPKn di sekolah menengah, menemukan bahwa meskipun substansi ekologis sudah mulai diakomodasi, integrasi yang lebih sistematis dan eksplisit masih diperlukan.

Sintesis dan Implikasi

Secara keseluruhan, literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa *ecological norm citizenship* merupakan konstruk yang dinamis, multidimensi, dan semakin interdisipliner. Terdapat konsensus yang berkembang bahwa norma kewarganegaraan ekologis mencakup: (1) dimensi kognitif berupa pengetahuan ekologis dan pemahaman tentang keterkaitan manusia-alam; (2) dimensi afektif berupa internalisasi nilai-nilai biosfer dan identitas ekologis; (3) dimensi normatif berupa rasa kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan; dan (4) dimensi behavioral berupa keterlibatan aktif dalam tindakan pro-lingkungan individual maupun kolektif.



Perkembangan terbaru dalam literatur menunjukkan setidaknya tiga pergeseran konseptual yang signifikan. Pertama, pergeseran dari pendekatan berbasis hak (*rights-based*) menuju pendekatan berbasis kewajiban dan kebajikan (*duties and virtues-based*), mengakui bahwa warga negara ekologis yang sejati tidak hanya menuntut hak-hak lingkungan tetapi juga secara sukarela menanggung kewajiban ekologis. Kedua, perluasan ruang kewarganegaraan dari ranah publik-formal menuju ruang privat dan digital, mengakui bahwa pilihan-pilihan sehari-hari tentang konsumsi, pangan, dan penggunaan teknologi merupakan ekspresi norma kewarganegaraan ekologis. Ketiga, semakin kuatnya hubungan antara ecological norm citizenship dengan agenda keadilan lingkungan dan keberlanjutan global, menjadikannya relevan bagi agenda SDGs.

Bagi Indonesia, implikasi utama dari temuan ini adalah perlunya pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang lebih holistik dan ekologis. PPKn perlu mengintegrasikan secara eksplisit norma-norma kewarganegaraan ekologis, tidak hanya sebagai tambahan konten tetapi sebagai reorientasi paradigmatis yang menempatkan tanggung jawab ekologis sebagai inti dari identitas warga negara Indonesia yang baik. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), dapat diinterpretasi ulang untuk memasukkan dimensi keadilan ekologis, menciptakan landasan kultural yang kuat bagi ecological norm citizenship yang khas Indonesia.

SIMPULAN

Tinjauan literatur sistematis ini berhasil mengidentifikasi dan mensintesis 20 artikel ilmiah yang mengkaji berbagai aspek *ecological norm citizenship* dalam periode 2019–2025. Lima tema utama yang ditemukan, yaitu konsep dan karakteristik *ecological norm citizenship*, norma ekologis dan perilaku pro-lingkungan, pendidikan kewarganegaraan ekologis, kewarganegaraan digital dan keterlibatan pemuda, serta kebajikan ekologis dan keadilan lingkungan, secara bersama-sama menggambarkan kompleksitas dan kedinamisan konstruk ini dalam konteks global dan lokal.

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa *ecological norm citizenship* merupakan konstruk multidimensi yang terus berkembang, mencakup dimensi kognitif, afektif, normatif, dan behavioral. Pendidikan kewarganegaraan ekologis yang efektif memerlukan pendekatan pedagogis yang melampaui transmisi pengetahuan untuk menginkorporasikan pengembangan nilai-nilai, pembentukan identitas ekologis, dan fasilitasi keterlibatan dalam aksi lingkungan nyata. Dalam konteks Indonesia, integrasi *ecological norm citizenship* ke dalam PPKn perlu dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, sekaligus terhubung dengan agenda global keberlanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan basis data dan bahasa yang digunakan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas pencarian ke basis data yang lebih beragam, melakukan meta-analisis kuantitatif untuk menilai besaran efek dari berbagai intervensi pendidikan kewarganegaraan ekologis, serta mengeksplorasi secara lebih mendalam bagaimana norma kewarganegaraan ekologis berinteraksi dengan konteks budaya dan sistem nilai yang berbeda-beda di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianata, & Ramadhan, I. (2025). Implementation of ecological citizenship to increase environmental awareness: A systematic literature review. *Journal of Civics and Moral Studies*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/10.26740/jcms.v10n1.p01-09>



- Ardoyn, N. M., Bowers, A. W., & Gaillard, E. (2023). A systematic mixed studies review of civic engagement outcomes in environmental education. *Environmental Education Research*, 29(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/13504622.2022.2135688>
- Ariza, M. R., Boeve-de Pauw, J., Olsson, D., Van Petegem, P., Parra, G., & Gericke, N. (2021). Promoting environmental citizenship in education: The potential of the Sustainability Consciousness Questionnaire to measure impact of interventions. *Sustainability*, 13(20), 11420. <https://doi.org/10.3390/su132011420>
- Biskupovic, C., Maurines, B., Carmona, R., & Canteros, E. (2022). Food democracy and sustainability in France and Chile: Community gardens promote ecological citizenship. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.949944>
- Bourban, M. (2023). Ecological cosmopolitan citizenship. *Future Humanities*, 1(2). <https://doi.org/10.1002/fhu2.5>
- Christodoulou, A., & Grace, M. (2024). Becoming ‘Wild Citizens’: Children’s articulation of environmental citizenship in the context of biodiversity loss. *Science & Education*, 34(3), 969–997. <https://doi.org/10.1007/s11191-024-00558-4>
- Gao, W. (2025). The virtues of ecological citizenship. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*. <https://doi.org/10.1080/13698230.2025.2491238>
- Gooding, L., & Phillips, R. (2025). Aligning digital futures with ecological citizenship for sustainability. *Sustainability*, 17(18), 8102. <https://doi.org/10.3390/su17188102>
- Gusmadi, S., & Samsuri, S. (2019). Gerakan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya pembentukan karakter peduli lingkungan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2). <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/9444>
- Hernández G de Velazco, J. J. (2023). Global citizenship: Towards a concept for participatory environmental protection. *Global Society*, 38(2), 269–296. <https://doi.org/10.1080/13600826.2023.2284150>
- Kabatiah, M., Wahyudi, A., & Dharma, S. (2024). Examining young citizen’s engagement in ecological citizenship for SDGs: A systematic literature review. Dalam *Proceedings of the International Conference on Social Studies*. SCITEPRESS. <https://www.scitepress.org/Papers/2024/134123/134123.pdf>
- Lu, D. (2024). Active, dutiful and pragmatic: Practicing green citizenship in urban China. *Environmental Politics*. <https://doi.org/10.1080/09644016.2024.2319520>
- Misra, M. (2023). Practicing ecological citizenship through community supported agriculture: Opportunities, challenges, and social justice concerns. *Culture, Agriculture, Food and Environment*, 45(1), 21–33. <https://doi.org/10.1111/cuag.12306>
- Nurdiansyah, E., & Komalasari, K. (2023). Membentuk kewarganegaraan ekologis melalui pendidikan lingkungan berbasis kegiatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 24(1), 42–49. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb/article/view/31844>
- Park, W.-Y., & Kim, C.-J. (2020). The impact of project activities on the cultivation of ecological citizenship in a high school climate change club. *Asia-Pacific Science Education*, 6(1), 41–69. <https://doi.org/10.1163/23641177-BJA00005>
- Pořkus, M. S. (2024). Testing the simple model of environmental citizenship in a sample of adolescents. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, 800. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03297-7>
- Sarid, A., & Goldman, D. (2021). A value-based framework connecting environmental citizenship and change agents for sustainability: Implications for education for environmental citizenship. *Sustainability*, 13(8), 4338. <https://doi.org/10.3390/su13084338>
- Sari, S. C. W., Samsuri, S., & Wahidin, D. (2020). Penguatan kewarganegaraan ekologis untuk mewujudkan ketahanan lingkungan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 40–54. <https://doi.org/10.22146/jkn.53816>



- Syahri, M., & Salahudin, S. (2024). Understanding ecological citizenship through global literature: A bibliometric analysis. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(7), 4088. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i7.4088>
- Usmi, R., & Murdiono, M. (2021). Ecological citizenship in the textbook of Pancasila and Civic Education subjects at secondary level school. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 242–256. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.38885>